



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

YOHANES SELVIANUS, laki-laki, lahir di Gehak, tanggal 10 Mei 1983, alamat tempat tinggal di Gehak Reta, RT/RW:008/003, Desa Koting D, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;

MAGDALENA ASISKA, perempuan, lahir di Maumere, tanggal 29 Mei 1995, alamat Gehak Reta, RT. 008 / RW 003, Desa/Kel. Koting, Kec. Koting, Kab. Sikka, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga ;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun PARA PEMOHON dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 13 Oktober 2023, dibawah register perkara Nomor:175/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai yang terlapir dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan PARA PEMOHON dibacakan, PARA PEMOHON menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, PARA PEMOHON telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307070105830003 atas nama Yohanes Selvianus, tertanggal 4 Oktober 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171016905950003 atas nama Magdalena Asiska, tertanggal 4 Oktober 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kawin Nomor: 4028/PFXK yang dikeluarkan Paroki St. Fransiskus Xaverius Koting Keuskupan Maumere, tertanggal 16 Maret 2021, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor: 5307-KW-29092023-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 29 September 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan isteri Nomor: 5307-KW-29092023-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 29 September 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307161712100044 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 29 September 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LU-04022019-0002 atas nama ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA yang lahir pada tanggal 29 Januari 2019 di Maumere, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 25 September 2019 bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, PARA PEMOHON juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **MARIA HENRIKA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama PARA PEMOHON pada kutipan akta kelahiran anak atas nama ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA;
 - Bahwa Saksi mengenal PARA PEMOHON karena Saksi **MARIA HENRIKA** adalah Kakak kandung dari PARA PEMOHON;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PEMOHON dengan Anak memiliki hubungan sebagai Bapak/Ibu kandung dan anak;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA tidak dicantumkan nama PEMOHON 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut PARA PEMOHON belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA lahir pada tanggal 29 Januari 2019 ;
- Bahwa PARA PEMOHON melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Januari 2021 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa tujuan permohonan agar nama PEMOHON 1 dicantumkan dalam akte kelahiran anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA;

2. Saksi YANUARIUS ARDIANUS, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama PEMOHON 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama ;
- Bahwa Saksi mengenal PARA PEMOHON karena Saksi adalah Ibu kandung dari PEMOHON 2;
- Bahwa PEMOHON 1 dengan anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA memiliki hubungan sebagai Bapak kandung dan anak;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama PEMOHON 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut PARA PEMOHON belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA lahir pada tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara agama katolik pada tanggal dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa tujuan permohonan agar nama PEMOHON 1 dicantumkan dalam akte kelahiran anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, PARA PEMOHON membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA atas nama MAGDALENA ASISKA juga hadir dipersidangan sebagai pemohon 2 dan atas pertanyaan Hakim, MAGDALENA ASISKA selaku Ibu Kandung dan juga PEMOHON 2 menyatakan tidak keberatan atas Permohonan dari PARA PEMOHON tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya PARA PEMOHON tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah PEMOHON 1 memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama YOHANES SELVIANUS dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka PARA PEMOHON telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **MARIA HENRIKA** dan Saksi **YANUARIUS ARDIANUS**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan PARA PEMOHON maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh PARA PEMOHON dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata PARA PEMOHON dapat membuktikan PARA PEMOHON, MAGDALENA ASISKA dan Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA bertempat tinggal di di Gehak Reta, RT/RW:008/003, Desa Koting D, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah PARA PEMOHON dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON, Permohonan PARA PEMOHON dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARIA HENRIKA** dan Saksi **YANUARIUS ARDIANUS** diperoleh fakta bahwa PARA PEMOHON dan istrinya yaitu MAGDALENA ASISKA telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 19 Januari 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA tidak dicantumkan nama PARA PEMOHON selaku ayah kandung karena pada saat Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA lahir pada 29 Januari 2019 **yang mana PARA PEMOHON belu menikah secara resmi walaupun telah tinggal selayaknya suami istri** (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARIA HENRIKA** dan Saksi **YANUARIUS ARDIANUS** serta berdasarkan pernyataan MAGDALENA ASISKA secara langsung di persidangan bahwa MAGDALENA ASISKA selaku Ibu Kandung dari Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA tidak berkeberatan atas permohonan dari PARA PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307161712100044 atas nama Kepala Keluarga YOHANES SELVIANUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa anak biologis dari PARA PEMOHON yaitu Anak ARCHANGELA NATHANIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALZHARA merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari PARA PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan PARA PEMOHON dan Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh PEMOHON 1 selaku orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan PARA PEMOHON, telah ternyata Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni MAGDALENA ASISKA, hal ini dikarenakan Anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya PARA PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, PARA PEMOHON yang telah memiliki seorang anak bernama ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA yang dilahirkan sebelum adanya ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah antara PARA PEMOHON, namun berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 19 Januari 2021 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan PARA PEMOHON untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan / pergantian nama PEMOHON 1 tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena PARA PEMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka PARA PEMOHON haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan maka PARA PEMOHON haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA lahir di Maumere pada tanggal 29 Januari 2019 sesuai Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-04022019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka pada 25 September 2019 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara PARA PEMOHON YOHANES SELVIANUS dan MAGDALENA ASISKA;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/IPN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA pada Kutipan Akta kelahiran ARCHANGELA NATHANIA ALZHARA guna menambahkan nama YOHANES SELVIANUS selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PEMOHON sejumlah Rp 223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dewi Y Nalle, S.H.selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh PARA PEMOHON;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Y Nalle, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 3.000,00;
biaya Panggilan		
4.....P		Rp 20.000,00
NBP		
5.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya Sumpah		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
Jumlah	:	<u>Rp223.000,00;</u>
		(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

